

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Siti Resmi 2011:1). Pajak merupakan bagian pendapatan negara yang dibagi dalam tujuh sektor utama. Sektor-sektor tersebut adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional, serta Bea Masuk dan Cukai

Secara struktural, Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri keuangan. Tugas dari Dirjen Bea dan Cukai adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai seperti etanol atau etil alkohol, minuman dengan kadar etil alkohol, produk tembakau seperti cerutu, sigaret, rokok, daun tembakau iris, dan hasil tembakau lainnya yang proses pembuatannya tidak sesuai dengan himbauan dari pemerintah. Adapun barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik seperti konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaian dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakainya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Di Indonesia cukai merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki kedudukan cukup penting sebagai alat pengumpul penerimaan negara. Selain itu, cukai juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol yang mempunyai tujuan membatasi konsumsi terhadap barang-barang yang dianggap memiliki dampak negatif.

Salah satu barang kena cukai yang peredarannya harus dikendalikan adalah hasil olahan tembakau. Rokok merupakan hasil olahan tembakau yang sering dijumpai di kalangan masyarakat. Jawa Barat menduduki posisi lima besar banyaknya penduduk yang mengkonsumsi rokok diantara provinsi lain. Karena rokok merupakan salah satu barang yang memiliki dampak negatif maka peredarannya harus dikendalikan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan peredarannya dengan menerapkan cukai pada hasil tembakau. Untuk mengendalikan konsumsi rokok dikalangan masyarakat maka Kementerian Keuangan melakukan salah satu upaya dengan menaikkan cukai harga tembakau dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

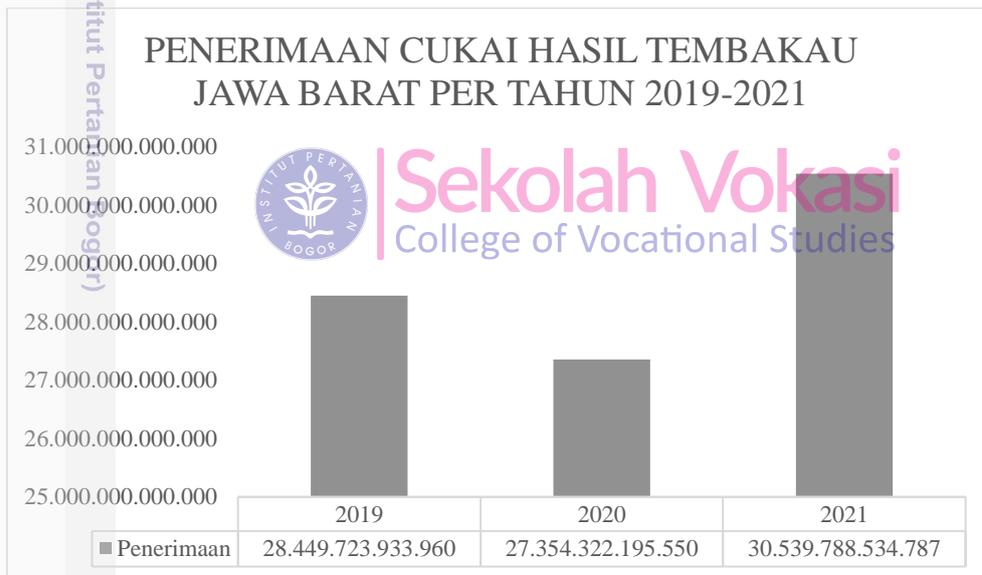
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris yang berlaku mulai 1 Januari 2022. Adapun kebijakan cukai hasil tembakau dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti pengendalian konsumsi rokok, tenaga kerja, penerimaan negara dan penjualan barang ilegal. Kenaikan tarif cukai juga memberikan dampak terhadap pengusaha kecil penjual rokok. Akibat kenaikan tarif cukai hasil tembakau maka ada beberapa pengusaha yang mengalami berhenti produksi atau mengalami *collapse*. Hal ini mengakibatkan meningkatnya penjualan rokok ilegal yang sangat merugikan negara. Berdasarkan keempat pertimbangan tersebut, pemerintah meyakini kebijakan kenaikan cukai tepat untuk dijalankan, terutama dari sisi Kesehatan. Seperti yang diketahui dunia saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19. Di mana rokok diklaim berperan besar dalam memperburuk kondisi masyarakat yang terkena Covid-19.

Namun demikian, disadari bahwa olahan hasil tembakau ternyata memiliki peranan penting dalam penerimaan negara. Berikut adalah grafik penerimaan cukai hasil tembakau di Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat Tahun 2019-2022.



1.1 Gambar Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat Tahun 2019-2021

Sumber: Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat

Grafik diatas merupakan grafik penerimaan cukai hasil tembakau tahun 2019-2021 di Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat. Dapat dilihat penerimaan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Namun apabila dilihat melalui grafik per bulan Februari tahun 2019-2022 maka penerimaan cukai hasil tembakau mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut grafik penerimaan per bulan Februari Tahun 2019-2022.



**1.2 Gambar Penerimaan Cukai Hasil Tembakau  
Per Bulan Februari**

Sumber: Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat

Penerimaan cukai hasil tembakau per bulan Februari di Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ada faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau di Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat per bulan Februari setiap tahunnya. Faktor tersebut adalah adanya dua perusahaan yang selalu membayarkan tagihan cukai di bulan Februari setiap tahunnya. Selain itu adanya kebijakan kenaikan tarif cukai yang dikenakan setiap bulan Januari.

Sesuai penjelasan diatas maka disusunlah Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Negara Pada Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat” yang akan menjelaskan bagaimana penerimaan cukai hasil tembakau terhadap penerimaan negara.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan laporan akhir ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau tahun 2019-2022?
2. Bagaimana penerimaan cukai hasil tembakau di Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat tahun 2019-2022?
3. Bagaimana pengaruh pengguna jasa terhadap penerimaan cukai hasil tembakau di Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat?
4. Bagaimana dampak kenaikan cukai terhadap penerimaan negara di Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa barat?.

### 1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan penulisan laporan akhir ini adalah:

1. Menguraikan kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau tahun 2019-2022.
2. Menguraikan penerimaan cukai hasil tembakau di Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat tahun 2019-2022.
3. Menguraikan pengaruh pengguna jasa importir terhadap penerimaan cukai hasil tembakau.
4. Menguraikan dampak kenaikan cukai terhadap penerimaan negara di Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa barat

### 1.4 Manfaat

Penulisan laporan akhir ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Untuk Penulis  
Untuk penulis, laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai penulisan karya ilmiah dan juga menambah wawasan mengenai analisis penerimaan cukai hasil tembakau terhadap penerimaan negara pada Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat.
2. Untuk Pembaca  
Untuk pembaca, laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai analisis penerimaan hasil tembakau terhadap penerimaan negara pada Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penulisan-penulisan selanjutnya.
3. Untuk Sekolah Vokasi IPB University  
Untuk Sekolah Vokasi IPB University, laporan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan pembelajaran terkait analisis penerimaan hasil tembakau terhadap penerimaan negara pada Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat.
4. Untuk Instansi Penerimaan Negara  
Untuk Instansi Penerimaan Negara, tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi mengenai analisis penerimaan hasil tembakau terhadap penerimaan negara pada Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat.